

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian pembahasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam praktek Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT.Titipan Kilat (TIKI) Cabang Kota Kediri Sebagai Berikut :

1. Praktik jasa pengiriman barang yang dilakukan oleh PT.TIKI menggunakan timbangan perkilogram, sehingga setiap konsumen harus mengikuti timbangan perkilogram, padahal setiap barang yang dikirim tidak pas satu kilogram. Dengan begitu banyak konsumen yang merasa dirugikan.
2. Konsumen merasa terpaksa mengirimkan barang. Hal ini karena tidak ada pilihan lain.
3. Tinjauan hukum islam terhadap pembulatan timbangan jasa pengiriman barang di PT.TIKI tidak diperbolehkan. Ada beberapa alasan mengapa sistem pembulatan timbangan tidak diperbolehkan. *Alasan yang pertama*, yaitu pembulatan timbangan tidak sesuai dengan ayat Al-Quran surah Hud ayat 85 bahwa diperintahkan untuk memenuhi timbangan. **Alasan yang kedua** yaitu praktik transaksi pada PT.TIKI tidak sesuai dengan syarat ijarah yang mana harus ada kerelaan kedua belah pihak dan banyak konsumen yang tidak menyetujui adanya pembulatan timbangan tersebut.

Alasan yang ketiga yaitu bertentangan dengan prinsip keadilan yang termasuk prinsip muamalah. Dan melihat pada kasus yang penulis teliti hanya satu pihak saja yang menguntungkan yaitu pihak PT.TIKI. Alasan ke empat yaitu praktek pembulatan timbangan melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 yang terdapat pada pasal 8 butir c, menyebutkan bahwa pelaku usaha atau jasa dilarang memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut hitungan sebenarnya,

SARAN

Setelah penulis melakukan penelitian tentang Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT.Titipan Kilat (TIKI) Cabang Kota Kediri , maka penulis menyampaikan beberapa saran :

1. Bagi perusahaan hendaknya menggunakan *member card* khusus, untuk pengiriman barang kepada konsumen yang sisa timbangannya atau sisa dari transaksi dimasukan ke dalam *member card* tersebut,
2. Diharapkan kepada PT.TIKI menerapkan pembulatan timbang per $\frac{1}{2}$ kg. misal berat yang dikirm 0,3 ons maka seharusnya menjadi 0,5 dan seterusnya.
3. Bagi pemerintah , perlu adanya regulasi yang spesifik terkait jasa pengiriman barang, dan pengawasan terhadap operasional

perusahaan jasa. Mengingat kebutuhan masyarakat dan demi tercapainya pendistribusian barang yang lebih efisien.